MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

ANALISIS PENCATATAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY

Firda Sari Dwi Ananta[1], Erna Hidayah[2]
Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia

Email: 22312265@students.uii.ac.id, 873120102@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pencatatan akuntansi keuangan pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Proses pencatatan meliputi penginputan dokumen SPJ, verifikasi data, serta penyusunan laporan keuangan. Ditemukan beberapa kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis sistem. Langkah perbaikan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan optimalisasi penggunaan sistem.

Kata kunci: Akuntansi Pemerintahan, Sap Berbasis Akrual, SIPD, Laporan Keuangan

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan pemerintahan berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan aktivitas keuangan secara sistematis. Informasi keuangan yang dihasilkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, pengendalian, evaluasi kinerja, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2018). Pemerintah Indonesia menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan yang seragam, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Penerapan standar tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (2010). Penerapan SAP menggunakan basis akrual, yaitu pengakuan transaksi berdasarkan timbulnya hak dan kewajiban tanpa bergantung pada arus kas. Pendekatan ini menghasilkan informasi keuangan yang lebih komprehensif karena mencerminkan aset, kewajiban, ekuitas, serta kinerja pemerintah secara lebih akurat. Penerapan SAP berbasis akrual terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan dan ketertiban pencatatan transaksi pada pemerintah daerah. Pelaksanaan SAP berbasis akrual masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, konsistensi penerapan prosedur, serta dukungan teknologi informasi yang belum optimal. Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah (Kartikaningtyas & Abdurahim, 2024).

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD RI mendukung proses penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan agar sesuai dengan SAP berbasis akrual sehingga meningkatkan efisiensi dan ketertiban administrasi. Efektivitas penerapan sistem tersebut dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam mengoperasikan teknologi dan mematuhi prosedur yang berlaku (Mauliza et al., 2025). Kualitas pencatatan akuntansi juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang mampu menjamin ketepatan, kelengkapan, dan keandalan pencatatan transaksi sekaligus mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan. Penerapan SAP berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal yang baik terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pratama et al., 2024). Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi strategis di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Pelaksanaan tugas tersebut melibatkan berbagai aktivitas keuangan yang memerlukan pencatatan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan magang di instansi tersebut memberikan kesempatan untuk memahami secara langsung praktik pencatatan akuntansi keuangan, penerapan sistem berbasis akrual, serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Pengalaman tersebut menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi kesesuaian praktik dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis proses pencatatan akuntansi keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian proses pencatatan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai praktik pencatatan akuntansi keuangan pada instansi pemerintah daerah sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pencatatan akuntansi keuangan. Manfaat penelitian mencakup peningkatan pemahaman mengenai praktik akuntansi pemerintahan, penyediaan masukan bagi instansi dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi, serta kontribusi bagi pengembangan akademik dan kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Informasi keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi digunakan untuk menilai kinerja pemerintah, mengendalikan pelaksanaan anggaran, serta memastikan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konteks tersebut menempatkan akuntabilitas publik sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui penyajian, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan kepada pihak berwenang dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Akuntansi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna

mendukung transparansi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).(Mardiasmo, 2021)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan diberlakukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penetapan SAP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP menggunakan basis akrual yang mengakui transaksi keuangan pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa bergantung pada waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Penerapan basis akrual (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)., 2010)

Pencatatan Laporan Keuangan

Pencatatan akuntansi keuangan merupakan tahap awal dalam siklus akuntansi yang berfungsi untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan yang tertib memungkinkan informasi keuangan disusun secara runtut sebagai dasar dalam proses pengikhtisaran dan penyusunan laporan keuangan. Instansi pemerintah mewajibkan pencatatan akuntansi keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Transaksi keuangan diakui pada saat timbulnya hak dan kewajiban. Pencatatan yang sesuai dengan SAP menjadi dasar dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2021)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Laporan keuangan disusun sebagai sarana penyampaian informasi keuangan kepada para pengguna laporan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan berperan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh ketepatan dan ketertiban dalam pencatatan akuntansi keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)., 2010)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengelolaan pemerintahan daerah secara terintegrasi. Sistem ini memuat data pembangunan daerah, data keuangan daerah, serta data pemerintahan daerah yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2019). SIPD RI berfungsi sebagai sarana pendukung pencatatan dan pengolahan transaksi keuangan agar selaras dengan ketentuan SAP berbasis akrual. Pemanfaatan sistem ini membantu instansi pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang tertib dan sistematis. Tingkat

efektivitas penggunaan SIPD RI dipengaruhi oleh ketertiban prosedur pencatatan serta kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut (Mauliza et al., 2025). Penelitian ini menempatkan SIPD RI sebagai sistem pendukung dan tidak menjadikannya sebagai fokus utama dalam analisis pencatatan akuntansi keuangan pada instansi pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis proses pencatatan akuntansi keuangan pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme pencatatan, kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengkaji fenomena pada kondisi alamiah (Sugiyono, 2023). Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan akuntansi keuangan, meliputi bagian akuntansi dan bendahara. Informasi yang dikumpulkan mencakup prosedur kerja, mekanisme pencatatan, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), serta kendala yang dihadapi. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pencatatan serta pelaporan keuangan pemerintah.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai praktik pencatatan akuntansi keuangan berdasarkan pengalaman informan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pencatatan transaksi, alur kerja akuntansi dan bendahara, serta pemanfaatan SIPD RI. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi dan memverifikasi hasil observasi serta wawancara melalui dokumen administratif dan regulasi terkait (Fiantika et al., 2022). Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2023). Data diseleksi berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, kemudian disajikan secara naratif agar memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarinformasi. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin keabsahan dan konsistensi data sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pencatatan akuntansi keuangan pada instansi pemerintah daerah.

HASIL DAN DISKUSI

Profil Tempat Magang

Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Setda DIY) merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah Sekretariat Daerah DIY. Instansi ini memiliki tugas mendukung perumusan kebijakan strategis di bidang perekonomian dan sumber daya alam melalui koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sejarah organisasi menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan

kebutuhan pemerintahan daerah. Biro ini sebelumnya bernama Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Biro APSDA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008. Perubahan nomenklatur menjadi Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi biro mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan kegiatan biro di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Pelaksanaan tugas biro meliputi penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan reformasi birokrasi, pengembangan proses bisnis, penyelenggaraan teknologi informasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyusunan laporan, serta kegiatan ketatausahaan. Struktur organisasi juga mengalami penyederhanaan dari tiga bagian dan enam subbagian menjadi Kepala Biro, Bagian Rekayasa Perekonomian yang didukung Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Perubahan tersebut mencerminkan upaya membangun organisasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kinerja dalam mendukung pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aktivitas Magang

Pelaksanaan kegiatan magang di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY berlangsung selama empat bulan, mulai 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026. Kegiatan diawali dengan konfirmasi kepada instansi dan pengarahan mengenai jam kerja, tata tertib, serta ketentuan berpakaian. Jam kerja dilaksanakan selama lima hari, Senin sampai Jumat, sedangkan ketentuan berpakaian disesuaikan dengan kebijakan instansi, termasuk penggunaan batik selama Oktober dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Penempatan awal berada pada Bagian Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian dengan fokus pada adaptasi lingkungan kerja, pengenalan struktur organisasi, serta pemahaman tugas dan fungsi setiap bagian. Penugasan berikutnya dilakukan di Bagian Rekayasa Perekonomian, khususnya Subbagian Tata Usaha, melalui kegiatan pengelolaan dokumen, pengarsipan, dan administrasi harian sehingga memberikan pemahaman mengenai sistem administrasi di instansi pemerintah.

Penempatan utama berlangsung pada bagian pengelolaan akuntansi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemindaian dokumen keuangan dan kepegawaian, pengelompokan arsip, penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), penginputan data keuangan dan kepegawaian, pengecekan laporan keuangan, serta pengelolaan arsip aktif dan inaktif. Keterlibatan dalam rapat dilakukan melalui pencatatan hasil rapat dan persiapan administrasi untuk kegiatan internal maupun eksternal. Rangkaian kegiatan magang dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pengenalan lingkungan kerja, dukungan administrasi, penginputan data, penyusunan dokumen pertanggungjawaban, pengelolaan arsip, hingga pengecekan laporan keuangan dan revisi dokumen. Seluruh kegiatan memberikan pengalaman praktis mengenai administrasi dan pencatatan keuangan pada instansi pemerintah daerah. Pemahaman terhadap alur kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan administrasi meningkat melalui keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas sehingga kegiatan magang berjalan sesuai rencana dan mendukung penguasaan praktik akuntansi pemerintahan.

Proses Pencatatan Akuntansi Keuangan

Proses pencatatan akuntansi keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem utama dalam pengelolaan transaksi keuangan. Mekanisme pencatatan telah mengikuti ketentuan pemerintah daerah melalui integrasi antara bendahara, pengelola persediaan, dan pengelola aset. Laporan keuangan biro menjadi bagian dari laporan keuangan Sekretariat Daerah DIY yang selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pencatatan diawali dengan administrasi transaksi pengeluaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Sekretariat Daerah DIY. Bendahara bertugas mengelola uang persediaan serta menatausahakan setiap transaksi berdasarkan dokumen pendukung, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kwitansi, invoice, daftar hadir, dan dokumen lain yang relevan. Kelengkapan dokumen menjadi dasar pelaksanaan verifikasi sebelum transaksi diinput ke dalam SIPD.

Penginputan transaksi dilakukan sesuai kode rekening belanja setelah diverifikasi oleh staf akuntansi. Data yang tersimpan dalam SIPD dimanfaatkan untuk pengecekan serta penyusunan laporan keuangan sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integrasi proses penatausahaan dengan pencatatan akuntansi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan jaringan dan perbedaan angka pada beberapa laporan, khususnya neraca, sehingga diperlukan verifikasi ulang. Proses pencatatan juga mencakup jurnal penyesuaian yang masih dilakukan secara manual untuk transaksi persediaan dan aset. Data berasal dari laporan mutasi barang, mutasi aset, dan penyusutan aset. Staf akuntansi mencatat beban persediaan, beban penyusutan, mutasi aset, serta penghapusan aset secara periodik pada akhir bulan maupun saat penyusunan laporan semester dan tahunan. Pencatatan tersebut menunjukkan penerapan basis akrual karena transaksi diakui berdasarkan terjadinya hak, kewajiban, atau peristiwa ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan arus kas. Beban persediaan diakui saat persediaan digunakan, sedangkan penyusutan aset dicatat secara berkala untuk mencerminkan penurunan nilai manfaat aset sesuai dengan prinsip SAP berbasis akrual.

Analisis Dokumen SPJ Fungsional Oktober 2025

Analisis penelitian didukung oleh dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional Oktober 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara atas realisasi belanja dalam satu periode anggaran. Dokumen ini berperan penting dalam memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa SPJ memuat informasi mengenai pagu anggaran, realisasi bulan sebelumnya, realisasi bulan berjalan, realisasi kumulatif, serta sisa pagu anggaran. Dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian anggaran sekaligus memberikan gambaran tingkat penyerapan anggaran. Total pagu belanja tercatat sebesar Rp1.458.334.150,00 dengan realisasi kumulatif hingga Oktober sebesar Rp1.283.322.836,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp175.011.314,00. Informasi tersebut menjadi dasar evaluasi untuk memastikan realisasi belanja tetap sesuai dengan batas anggaran yang ditetapkan.

SPJ juga menyajikan klasifikasi belanja berdasarkan kode rekening yang mencakup belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta belanja operasional lainnya. Penyajian tersebut

menunjukkan bahwa pencatatan telah mengikuti sistem pengkodean yang terstandar sehingga mendukung penyusunan Laporan Realisasi Anggaran secara sistematis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SPJ menjadi dasar utama penginputan transaksi ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Proses penyusunan dan verifikasi SPJ dilakukan sebelum data diinput sehingga setiap transaksi telah melalui pemeriksaan administratif. Data dalam SPJ kemudian dimanfaatkan oleh staf akuntansi untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Perspektif Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual menunjukkan bahwa SPJ menyediakan informasi realisasi belanja yang menjadi dasar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan jurnal penyesuaian berbasis akrual, seperti pengakuan beban persediaan dan penyusutan aset. Analisis dokumen menunjukkan bahwa SPJ Fungsional Oktober 2025 telah disusun secara sistematis sesuai mekanisme penatausahaan keuangan daerah serta mendukung kesesuaian antara pencatatan administratif dan pencatatan akuntansi berbasis akrual.

Analisis Peran SIPD dalam Pencatatan Akuntansi

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi sistem utama dalam mendukung proses pencatatan akuntansi keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Seluruh transaksi pengeluaran yang terjadi dicatat oleh bendahara berdasarkan dokumen sumber yang telah diverifikasi, kemudian diinput ke dalam sistem SIPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Data yang tersimpan dalam sistem tersebut selanjutnya dapat diakses oleh staf akuntansi untuk keperluan pencatatan lanjutan dan penyusunan laporan keuangan. Mekanisme ini menunjukkan adanya alur kerja yang sistematis antara proses penatausahaan dan proses akuntansi. Integrasi antara bendahara dan staf akuntansi melalui SIPD menunjukkan bahwa sistem ini berfungsi sebagai penghubung utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Data transaksi yang diinput oleh bendahara menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan staf akuntansi melengkapi pencatatan melalui jurnal penyesuaian untuk transaksi tertentu. Peran tersebut menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem yang mendukung integrasi data keuangan secara menyeluruh.

Pemanfaatan SIPD memberikan kemudahan dalam mempercepat proses pencatatan serta penyusunan laporan keuangan. Sistem ini mampu menghasilkan berbagai laporan keuangan secara otomatis setelah data transaksi dan jurnal dimasukkan ke dalam sistem. Laporan yang dihasilkan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, serta Laporan Perubahan Ekuitas. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa SIPD telah dirancang untuk mendukung implementasi sistem akuntansi berbasis akrual secara terintegrasi. Pelaksanaan penggunaan SIPD masih menghadapi kendala teknis yang memengaruhi efektivitas sistem. Gangguan jaringan yang terjadi pada waktu tertentu serta adanya perbedaan angka pada beberapa laporan menyebabkan staf akuntansi perlu melakukan pengecekan manual untuk memastikan keakuratan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah mendukung efisiensi dan integrasi, optimalisasi sistem masih diperlukan agar proses pencatatan dapat berjalan secara lebih konsisten dan andal.

Analisis Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Pencatatan akuntansi keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY secara umum telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar ini menekankan bahwa pengakuan transaksi dilakukan berdasarkan peristiwa ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan arus kas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme

pencatatan yang diterapkan telah mengarah pada prinsip tersebut melalui adanya penyesuaian akuntansi pada akhir periode. Pencatatan awal transaksi yang dilakukan oleh bendahara masih berbasis kas melalui dokumen SPJ Fungsional. Data tersebut kemudian digunakan oleh staf akuntansi sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian berbasis akrual. Penyesuaian dilakukan untuk mencatat transaksi yang belum tercermin dalam sistem kas, seperti beban persediaan yang telah digunakan dan kewajiban yang timbul dalam periode berjalan. Proses ini menunjukkan bahwa pencatatan tidak hanya berfokus pada arus kas, tetapi juga pada substansi ekonomi transaksi.

Penerapan basis akrual juga terlihat dalam pencatatan penyusutan aset yang dilakukan secara periodik. Penyusutan mencerminkan penurunan nilai manfaat aset tetap selama masa penggunaannya dan dicatat sebagai beban dalam laporan operasional. Pencatatan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan penggunaan kas, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan relevan. Penyajian laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa struktur laporan telah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun demikian, proses penyusunan laporan masih memerlukan pengecekan manual untuk memastikan kesesuaian data yang dihasilkan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SAP telah berjalan secara substansi, namun masih memerlukan optimalisasi dalam aspek teknis dan sistem pendukung.

Kendala dan Langkah Perbaikan dalam Pencatatan Akuntansi Keuangan

Pelaksanaan pencatatan akuntansi keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Proses yang terstruktur dan didukung oleh sistem SIPD menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki dasar pengelolaan keuangan yang baik. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan aspek teknis sistem SIPD. Gangguan jaringan yang terjadi terutama pada waktu tertentu menyebabkan proses penginputan data menjadi terhambat. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksesuaian angka pada beberapa laporan, khususnya pada laporan neraca, sehingga memerlukan pengecekan ulang oleh staf akuntansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas sistem masih menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pencatatan.

Ketergantungan pada pencatatan manual masih dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal. Bendahara dan staf akuntansi melakukan pengecekan serta perbandingan antara data sistem dan dokumen sumber untuk memastikan keakuratan informasi. Praktik ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, namun di sisi lain juga mengindikasikan bahwa sistem belum sepenuhnya dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber data. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara sistem digital dan pengawasan manual dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Langkah perbaikan dilakukan melalui pengecekan dan rekonsiliasi data secara berkala, perbandingan data dengan dokumen sumber, serta koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kendala teknis. Langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi lebih bersifat teknis daripada konseptual, sehingga optimalisasi sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi akuntansi berbasis akrual.

SIMPULAN

Pencatatan akuntansi keuangan pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY menunjukkan penerapan sistem yang terstruktur. Proses berjalan melalui tahapan pengumpulan dokumen, verifikasi, penginputan, serta penyusunan laporan keuangan. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah mendukung ketertiban administrasi keuangan. Penerapan tersebut menghasilkan informasi yang lebih akurat dan sistematis.Pelaksanaan pencatatan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pengakuan transaksi dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul.

Penyajian laporan keuangan mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya langkah instansi dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pencatatan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia memengaruhi ketelitian dan kecepatan kerja. Gangguan teknis sistem menghambat proses penginputan data. Ketidaksesuaian dokumen menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pencatatan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan. Langkah perbaikan dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai serta optimalisasi penggunaan sistem. Pelatihan teknis memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur pencatatan. Peningkatan koordinasi antar bagian mempercepat penyelesaian pekerjaan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pencatatan akuntansi keuangan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGMEN*T)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY atas kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, informasi, serta bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi*.

Kartikaningtyas, A. P., & Abdurahim, A. (2024). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, *2*(1), 1–12.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.

Mauliza, S., Nissa, F., & Hasibuan, M. (2025). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ikraith-Ekonomika*, *8*(3), 954–963.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah, (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)., (2010).

Pratama, E. A., Sinadela, S., & Gushendarto, G. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *Journal of Economics and Management*, *2*(1), 47–59.

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.